SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Pemikiran Politik H.O.S. Tjokroaminoto tentang Negara, Demokrasi, dan Relasi Agama-Negara: Analisis Historis dan Relevansinya bagi Indonesia Kontemporer

Silvia Maharani[1]
[1] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
Korespondensi: 253507111008@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 11th, 2026
Accepted Nov 19th, 2026

Kata Kunci:
H.O.S. Tjokroaminoto; Pemikiran politik; Sosialisme Islam; Demokrasi; Relasi agama-negara.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pemikiran politik H.O.S. Tjokroaminoto mengenai negara, demokrasi, kesetaraan, dan relasi agama-negara, serta menilai relevansi dan keterbatasannya bagi Indonesia kontemporer. Penelitian menggunakan metode sejarah berbasis studi pustaka terhadap 23 sumber sekunder (artikel jurnal, prosiding, dan skripsi, 1992-2025) dengan analisis isi tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tjokroaminoto merumuskan sosialisme Islam sebagai kerangka politik yang bertumpu pada kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan; memandang negara sebagai alat kesejahteraan bersama; menempatkan musyawarah sebagai inti pengambilan keputusan; dan menjadikan Islam sebagai dasar nasionalisme. Pemikirannya berkembang dalam beberapa fase sehingga tidak dapat direduksi pada satu gagasan. Analisis kritis menemukan lima keterbatasan: kedekatan naskah *Islam dan Sosialisme* dengan karya Kidwai, kedalaman dasar keagamaan yang diperdebatkan, ketegangan antara hukum ilahi dan kedaulatan rakyat, kesulitan menjaga persatuan gerakan, serta ketergantungan pada figur karismatik. Gagasan tersebut tetap relevan sebagai sumber etika keadilan sosial dan musyawarah, tetapi perlu dibaca secara kritis dan kontekstual. Penelitian lanjutan disarankan menelaah naskah primer secara langsung.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Haji Oemar Said Tjokroaminoto (selanjutnya Tjokroaminoto) merupakan pemimpin Sarekat Islam (SI) yang dijuluki guru para pendiri bangsa. Rumahnya di Surabaya menjadi tempat berbagai ideologi dibahas secara kritis oleh para pemuda yang kelak menempuh jalan berbeda: Soekarno sebagai nasionalis, Semaoen sebagai komunis, dan Kartosuwiryo sebagai Islamis (Ulumiyah, 2023; Manan, 2016). Kenyataan bahwa satu guru melahirkan murid dari tiga arah ideologi yang saling bertentangan menunjukkan bahwa pemikiran politiknya memuat persoalan yang sampai kini belum selesai dalam politik Indonesia, yakni bagaimana Islam, keadilan sosial, demokrasi, dan kebangsaan ditempatkan dalam satu kerangka bernegara. Wibisono (2020) menunjukkan bahwa pertarungan antara nasionalisme sekuler dan nasionalisme berbasis agama merupakan tema yang berulang sejak masa pergerakan, dan Tjokroaminoto berada di pusat perdebatan itu.

Kajian tentang Tjokroaminoto cukup banyak dan tersebar menurut temanya. Sosialisme Islam dibahas oleh Manan (2016), Ferdhiyadi dkk. (2023), serta Alfarizi dan Fuad (2025); keadilan sosial dalam *Islam dan Sosialisme* oleh Junaidi dkk. (2023); nasionalisme Islam oleh Wibisono (2020), Af'ali (2017), dan Matien (2024); politik Islam oleh Firdian (2020); relasi agama dan negara oleh Suhardi (2004); biografi dan dakwahnya oleh Syukur dkk. (2020); kepemimpinan karismatiknya oleh Rizkianto (2020); pendidikan oleh Ainol dan Ibrahim (2020), Hakim dan Wirano (2020), serta Wijiyanto (2025); ekonomi oleh Cahyani dan Hasan (2024) dan Ibnu (2024); karakter keilmuan karyanya oleh Wiyono

(2017); dan pengaruhnya terhadap tokoh lain oleh Prayitno dkk. (2022) serta Taufiqurrahman (2023). Ulumiyah (2023) menunjukkan bahwa pemikirannya berkembang melalui tiga fase pada kurun 1924-1928 sehingga tidak dapat direduksi pada sosialisme Islam semata.

Meskipun demikian, terdapat tiga celah penelitian. Pertama, sebagian besar kajian bersifat deskriptif dan apresiatif. Manan (2016) sendiri mencatat bahwa tulisannya hampir tidak mengevaluasi kelemahan logis gagasan Tjokroaminoto, dan sketsa biografis Daulay (1997) menilai kontribusinya secara positif tanpa kritik substantif. Kedua, temuan Fogg (2019) bahwa *Islam dan Sosialisme* sangat dekat dengan karya Mushir Hosein Kidwai yang terbit di London pada 1912 belum menjadi bagian dari penilaian relevansi dalam kajian-kajian lain yang penulis telaah. Ketiga, konsep negara, demokrasi, kesetaraan, dan relasi agama-negara dibahas secara terpisah sehingga belum tampak sebagai satu bangunan pemikiran politik yang dapat dinilai kekuatan dan kelemahannya.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. (1) Bagaimana konteks sosio-politik yang membentuk pemikiran politik Tjokroaminoto? (2) Apa inti pemikirannya tentang negara, demokrasi, kesetaraan, serta relasi agama, nasionalisme, dan negara? (3) Bagaimana relevansi pemikiran itu bagi Indonesia kontemporer, dan kritik apa yang dapat diajukan terhadapnya? Artikel disusun dengan urutan: metodologi, biografi singkat dan setting historis, analisis pemikiran politik, relevansi dan kritik kritis, lalu penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode sejarah berbasis studi pustaka (*library research*). Metode sejarah dijalankan melalui empat tahap, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi, sebagaimana juga dipakai Ulumiyah (2023) dalam menelaah pemikiran Tjokroaminoto. Pendekatan yang digunakan adalah sejarah pemikiran politik dengan analisis isi tematik. Sasaran penelitian adalah gagasan Tjokroaminoto sebagaimana dipaparkan dalam literatur ilmiah, sehingga tidak ada populasi, sampel, maupun responden lapangan.

Pada tahap heuristik, penelusuran dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci "tjokroaminoto" dan "tjokroaminoto relevansi", dilengkapi penelusuran web pada Oktober sampai November 2026. Sumber dipilih berdasarkan tiga kriteria: sesuai dengan tema pemikiran politik, sosial-ekonomi, nasionalisme, atau pendidikan Tjokroaminoto; isinya dapat dibaca secara utuh atau cukup lengkap; dan identitas publikasinya jelas. Dua puluh tiga sumber yang digunakan terdiri atas 17 artikel jurnal, 1 makalah prosiding, dan 5 skripsi. Lima belas di antaranya dibaca isinya secara memadai (teks lengkap atau bagian-bagian intinya), sedangkan delapan sumber (Af'ali, 2017; Amin, 1992; Cahyani & Hasan, 2024; Firdian, 2020; Fogg, 2019; Ibnu, 2024; Matien, 2024; Suhardi, 2004) hanya dapat diakses melalui abstrak atau ringkasannya. Karena itu, pernyataan yang bersumber dari kedelapan karya tersebut dibatasi pada apa yang tercantum dalam abstrak.

Pada tahap verifikasi, informasi yang berbeda antarsumber, misalnya tahun kelahiran Tjokroaminoto dan tahun berdirinya organisasi pendahulu SI, dicatat sebagai perbedaan dan tidak dipaksa disatukan. Pada tahap interpretasi, data direduksi menjadi gagasan inti tiap sumber, dikategorikan ke dalam tema negara, demokrasi, kesetaraan, agama dan nasionalisme, serta strategi politik, lalu dihubungkan dengan konteks sosio-politik masa itu dan masa kini. Perlu ditegaskan bahwa naskah primer Tjokroaminoto, seperti *Islam dan Sosialisme* (1924), *Tarikh Agama Islam* (1927), dan *Memeriksai Alam Kebenaran* (1928), tidak dianalisis secara langsung. Gagasan primer dirujuk melalui kajian sekunder, sehingga kesimpulan artikel ini merupakan sintesis atas tafsir para peneliti dan bukan pembacaan langsung atas naskah. Penilaian pada bagian relevansi dan kritik merupakan interpretasi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI SINGKAT TOKOH DAN SETTING HISTORIS

Riwayat Hidup

Sumber-sumber berbeda mengenai tahun kelahiran Tjokroaminoto: 16 Agustus 1882 (Ulumiyah, 2023) atau 16 Agustus 1883 (Alfarizi & Fuad, 2025), di kawasan Madiun dan Ponorogo, Jawa Timur. Ia berasal dari dua garis keturunan. Garis priyayi berasal dari ayahnya yang menjabat wedana dan kakeknya yang menjadi bupati Ponorogo, sedangkan garis ulama berasal dari buyutnya, Kyai Bagoes Kasan Besari, pengasuh pesantren Tegalsari (Ulumiyah, 2023). Daulay (1997) menyebut

latar santri dan priyayi ini sebagai bekal pendidikan Islam dan Barat yang ia terima. Ia menempuh pendidikan di OSVIA Magelang dan pada 1902 bekerja sebagai juru tulis di Ngawi, tetapi berhenti pada 1905 karena mempertanyakan ketidakadilan sistem pemerintahan kolonial (Ulumiyah, 2023). Alfarizi dan Fuad (2025) menambahkan bahwa ia mundur karena tidak sejalan dengan birokrasi yang menuntut pegawai pribumi bersikap merendah. Hal ini sejalan dengan catatan Daulay (1997) bahwa ia menolak bersikap tunduk kepada pejabat, baik Belanda maupun pribumi, dan menganggap dirinya setara dengan mereka.

Setelah bekerja serabutan di Semarang, ia pindah ke Surabaya pada 1907 dan aktif menulis di surat kabar dan majalah tentang kondisi rakyat yang terpuruk akibat eksploitasi perusahaan asing dan pendudukan kolonial (Ulumiyah, 2023). Pada 1912 ia memimpin Sarekat Islam, yang semula berorientasi pada kepentingan dagang dan kemudian berubah menjadi gerakan sosial-politik berskala nasional (Hakim & Wirano, 2020; Ulumiyah, 2023). Sumber berbeda mengenai tahun berdirinya organisasi pendahulu SI, yakni 1905 (Ulumiyah, 2023) atau 1911 (Hakim & Wirano, 2020), sehingga artikel ini hanya memakai 1912 sebagai tahun SI berada di bawah kepemimpinannya. Menurut Ulumiyah (2023), pada kurun 1912-1919 SI mencapai puncaknya dengan partisipasi 2,5 juta orang dan menjadi organisasi terbesar di Hindia Belanda, sehingga menjadi sasaran tekanan pemerintah kolonial, termasuk penangkapan Tjokroaminoto pada 1921. Daulay (1997) mencatat bahwa SI juga menarik dukungan tokoh non-Muslim seperti Douwes Dekker karena watak gerakan rakyatnya yang radikal dan tujuannya yang mengarah pada kemerdekaan. Tjokroaminoto wafat di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 (Ulumiyah, 2023).

Syukur dkk. (2020) melengkapi gambaran organisasinya. Menurut mereka, Sarekat Dagang Islam didirikan Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 untuk menentang masuknya pedagang asing yang menguasai ekonomi rakyat, dan pada 10 September 1912 namanya diubah menjadi Sarekat Islam dengan keanggotaan yang tidak lagi dibatasi pada pedagang. Ketika pemerintah kolonial tidak mengakui kepengurusan pusat yang membawahi cabang-cabang, Tjokroaminoto membentuk Central Sarekat Islam (CSI) pada Februari 1915, dan CSI diakui pemerintah pada 18 Maret 1916 (Syukur dkk., 2020). Rizkianto (2020) mencatat bahwa pertemuan terbuka pertama SI di Surabaya, yang ia gerakkan, dihadiri sekitar 80.000 orang.

Konteks Sosio-Politik Perumusan Pemikiran

Pemikiran politik Tjokroaminoto lahir dari struktur kolonial yang eksploitatif. Hakim dan Wirano (2020) serta Ulumiyah (2023) menguraikan pergeseran kebijakan Belanda dari tanam paksa ke politik liberal dan politik etis, yang menurut Hakim dan Wirano (2020) saling berkaitan dan tetap mempertahankan kekuasaan kolonial. Amin (1992) menggambarkan visi Tjokroaminoto tentang Indonesia merdeka sebagai antitesis terhadap kultur dan struktur kolonialisme, dan menyebut bahwa ia tidak menyukai eksploitasi ekonomi. Di bidang pendidikan, kebijakan kolonial bersifat diskriminatif, terbatas, dan tidak memuat pendidikan agama Islam, karena lebih didorong kebutuhan tenaga administrasi kolonial (Wijiyanto, 2025). Ainol dan Ibrahim (2020) menambahkan bahwa tujuan pendidikan etis antara lain menyiapkan tenaga kerja pribumi yang murah dan membentuk kelas sosial antara priayi dan rakyat miskin. Daulay (1997) mencatat bahwa tuntutan Tjokroaminoto mencakup penghentian kerja paksa, perluasan akses pendidikan bagi pribumi, dan satu hukum yang berlaku bagi semua warga.

Di samping tekanan kolonial, Tjokroaminoto menghadapi persaingan ideologi dari dalam gerakannya sendiri. Marxisme masuk melalui ISDV pada 1914 dan memecah SI (Hakim & Wirano, 2020). Semaoen, setelah bertemu Sneevliet, bergabung dengan ISDV dan memimpin SI Merah yang mengkritik gagasan bahwa Islam menjadi dasar gerakan SI. Konflik ini memudahkan pemerintah kolonial melemahkan SI, dan kongres di Surabaya menghasilkan kesepakatan disiplin partai (Ulumiyah, 2023). Syukur dkk. (2020) menyebut sejumlah faktor yang mempermudah infiltrasi ISDV: kekuasaan CSI yang lemah terhadap cabang-cabangnya, aturan partai yang membolehkan keanggotaan ganda, kenaikan harga dan penurunan upah akibat Perang Dunia I, serta kemiskinan rakyat sejak politik pintu terbuka dan wabah penyakit. Sejak dibebaskan pada 1922, Tjokroaminoto memperkuat rumusan ideologi Islamnya untuk mengimbangi kubu komunis. Wibisono (2020) membaca 1922 sebagai titik balik: setelah dipenjara dan gagal merangkul kaum buruh, Tjokroaminoto menilai nasionalisme perlu dibangun di atas identitas pembeda yang kuat, dan ia meyakini identitas itu adalah Islam.

Rumusan sosialisme Islam kemudian dibawa ke Kongres Al-Islam di Cirebon pada 1922 dan ditetapkan sebagai dasar ideologi pada 1923 di Madiun, ketika SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (Hakim & Wirano, 2020). Tjokroaminoto menerbitkan serangkaian tulisan "Islam dan Sosialisme" di *Soeara Boemipoetra* saat berada dalam tahanan (Ulumiyah, 2023). Konteks global ikut membentuk arah pemikirannya. Pada 1924 Turki mengubah sistem khilafah menjadi republik, dan pada 1926 Raja Saud menyelenggarakan kongres dunia Islam di Mekah yang dihadiri Tjokroaminoto sebagai wakil Indonesia. Di dalam negeri, PKI melakukan pemberontakan pada November 1926 yang ditumpas Belanda, dan Soekarno mendirikan PNI pada 1927 dengan memisahkan nasionalisme dari agama, meskipun hubungan pribadinya dengan sang guru tetap baik (Ulumiyah, 2023). Dalam situasi inilah pemikiran politik Tjokroaminoto perlu dibaca.

ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK

Sosialisme Islam sebagai Kerangka Politik

Inti pemikiran politik Tjokroaminoto terumus dalam sosialisme Islam. Wiyono (2017) menggambarkan *Islam dan Sosialisme* (1924) sebagai buku setebal 113 halaman dalam sepuluh bab yang bab-bab awalnya membahas sejarah Islam pada masa Nabi dan sahabat, lalu bentuk pemerintahan dan kehidupan bersama yang ideal menurut sosialisme religius. Tjokroaminoto sendiri menyebutnya sosialisme religius, bukan sosialisme ilmiah Karl Marx (Wiyono, 2017). Ia merumuskannya dalam tiga nilai, yakni kemerdekaan (*vrijheid*), persamaan (*gelijkheid*), dan persaudaraan (*broederschap*), yang menurutnya sudah diatur dalam ajaran Islam dan dijalankan Nabi (Manan, 2016; Ulumiyah, 2023).

Dua penegasan penting menandai posisi politiknya. Pertama, ia menolak anggapan bahwa sosialisme adalah produk Barat. Menurut Manan (2016), Tjokroaminoto menolak pemisahan yang dibuat sejarawan antara sosialisme sebagai pengaruh Barat dan Islam sebagai tradisi lokal, dengan menyatakan bahwa sosialisme sudah berkembang dalam tradisi Islam jauh sebelum muncul di Barat pada abad ke-19. Kedua, ia membedakan sosialisme Islam dari Marxisme dan kapitalisme. Terhadap Marxisme, ia menolak pandangan bahwa agama adalah ilusi atau candu serta materialisme historis yang dinilainya menafikan Tuhan. Terhadap kapitalisme, ia menolak riba dan eksploitasi, termasuk pengambilan hasil kerja orang lain tanpa pembagian keuntungan yang semestinya (Manan, 2016). Ulumiyah (2023) menambahkan bahwa menurut Tjokroaminoto sosialisme Barat bergerak dari atas, sedangkan sosialisme Islam bergerak dari bawah, yaitu dari rakyat. Ia sepakat dengan sosialisme yang membela kaum lemah karena Islam mengajarkan hal serupa, tetapi menolak dasar dan cara yang ditempuh sosialisme Barat.

Konsep Negara

Negara dalam pemikiran Tjokroaminoto dipahami sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tanpa perbedaan akses, dengan bangunan ekonomi sosialistik yang bebas dari monopoli, oligopoli, riba, dan eksploitasi (Suhardi, 2004). Manan (2016) merinci bahwa negara harus berperan aktif dalam ekonomi: tanah dikuasai negara sehingga tidak dikenal kepemilikan pribadi atas tanah, dan sumber produksi diarahkan bagi kepentingan rakyat. Tjokroaminoto membedakan sosialisme negara, baik terpusat maupun terdesentralisasi, dari sosialisme industri, dan ia menilai bentuk yang kedua inilah yang paling dijalankan Islam sejak Nabi Muhammad memegang kekuasaan negara.

Alfarizi dan Fuad (2025) merumuskan negara sosialisme Islam menurut Tjokroaminoto sebagai bangunan yang bertumpu pada trilogi tauhid, ilmu, dan kecerdikan siasat, serta mencakup empat bidang: ekonomi (kepemilikan sumber daya vital untuk kepentingan umum), politik (pemerintahan berdasarkan hukum Tuhan dan musyawarah), militer (pertahanan sebagai tanggung jawab rakyat), dan keuangan negara (bersumber dari zakat dan pajak). Trilogi itu sejalan dengan semboyan "setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat" yang dikaitkan dengan Tjokroaminoto (Prayitno dkk., 2022; Suhardi, 2004; Ulumiyah, 2023). Pada fase 1928, menurut Ulumiyah (2023), ia menilai Piagam Madinah sebagai *Qanun Asasi* (*Grondwet*) bagi rakyat, ikatan yang harus dipatuhi warga Muslim maupun non-Muslim, dan menyebut sistem politik Islam sebagai pemerintahan rakyat.

Gagasan ini tidak berhenti pada tataran konsep. Menurut Ulumiyah (2023), SI menjalankan misi sosial-ekonomi sebagai perlawanan terhadap kapitalisme kolonial dengan mendirikan koperasi, bank nasional berprinsip tanpa riba, dan federasi serikat buruh. Ibnu (2024) pada ranah pertanian menemukan bahwa kapitalisme membuat struktur pertanian kehilangan nilai budaya dan religiusnya, sehingga pemikiran Tjokroaminoto yang bercorak kebersamaan menawarkan sudut pandang alternatif bagi ekonomi pertanian.

Demokrasi dan Musyawarah

Musyawarah menempati posisi sentral dalam pandangan Tjokroaminoto tentang pengambilan keputusan bersama. Wiyono (2017) mencatat bahwa ia menafsirkan musyawarah sebagai inti praktik demokrasi, dan Firdian (2020) menempatkan musyawarah, persatuan dan persamaan, serta kesejahteraan rakyat sebagai tiga konsep pokok pemikiran politik Islamnya. Wijiyanto (2025) menunjukkan bahwa Tjokroaminoto memandang asas Islam sebagai asas yang menuju demokrasi dan sosialisme, dan karena itu pendidikan harus menanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi. Ulumiyah (2023) menambahkan bahwa menurut Tjokroaminoto kekuasaan dapat dipegang siapa saja, borjuis maupun proletar, asalkan tidak ada penindasan, dan Islam menempuh jalan damai, musyawarah, serta pembagian kekuasaan yang adil. Alfarizi dan Fuad (2025) mencatat bahwa perubahan sosial menurutnya harus ditempuh melalui revolusi moral dan sosial, bukan kekerasan. Junaidi dkk. (2023) mengutip pernyataan Tjokroaminoto bahwa Muslim yang sungguh memahami dan mengamalkan ajaran Islam tidak akan terhindar dari menjadi demokrat sejati dan sosialis sejati.

Pada saat yang sama, Tjokroaminoto mengkritik demokrasi perwakilan dalam sosialisme Barat. Menurut Manan (2016), ia berpendapat bahwa pembuatan hukum dalam Islam tidak diserahkan kepada kabinet, parlemen, atau kelompok kepentingan karena hukum berasal dari Tuhan; peran pemerintah adalah menjalankan hukum dengan pemimpin yang bijaksana sebagai pelaksana. Rakyat seharusnya memiliki suara langsung dalam urusan negara, tetapi mekanismenya tidak diuraikan lebih lanjut. Dalam praktik politik masa kolonial, Daulay (1997) mencatat bahwa melalui SI ia memperjuangkan pemerintahan sendiri atau setidaknya suara rakyat dalam lembaga politik. Dengan demikian, konsep demokrasinya dapat dibaca sebagai demokrasi yang bersifat etis dan partisipatoris, bukan demokrasi prosedural dengan pembagian kekuasaan legislatif seperti dalam tradisi liberal. Pembacaan ini merupakan interpretasi penulis.

Kesetaraan dan Perlindungan Martabat Manusia

Ainol dan Ibrahim (2020) menunjuk semboyan "sama rata sama rasa" sebagai rumusan kesetaraan Tjokroaminoto: kedudukan semua orang, baik priayi, rakyat jelata, maupun orang Belanda, dipandang sama, dan hanya ketakwaan di hadapan Tuhan yang membedakan. Gagasan ini diwujudkan, antara lain, dengan melemahkan simbol kasta dalam tradisi Jawa melalui gerakan Djawa Dwipa serta menentang sikap menghamba. Junaidi dkk. (2023), yang menelaah *Islam dan Sosialisme* dari sudut keadilan sosial, merangkum gagasan serupa dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah keadilan relasional, yang mencakup martabat manusia, persaudaraan, kesetaraan, dan hak perempuan dalam perkawinan. Dimensi kedua adalah keadilan distributif, yang mencakup zakat, kritik terhadap penimbunan harta tanpa fungsi sosial, dorongan agar kemiskinan tidak dipandang sebagai kehinaan, dan peran negara dalam menjaga pembagian yang adil.

Istilah hak asasi manusia dalam pengertian modern tidak dipakai oleh sumber-sumber yang ditelaah, sehingga bagian ini membaca gagasan kesetaraan dan perlindungan martabat manusia yang terkandung dalam pemikiran Tjokroaminoto tanpa memaksakan istilah tersebut. Ulumiyah (2023) mencatat bahwa ia mengutip hadis tentang kesetaraan semua manusia, yang menyatakan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, atau orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Alfarizi dan Fuad (2025) menjelaskan bahwa persamaan dalam pemikirannya berarti tidak adanya perbedaan kelas di hadapan Tuhan, termasuk bagi non-Muslim, sedangkan kemerdekaan berarti kebebasan menjalankan kebenaran ilahi dengan kewajiban hanya kepada Allah. Menurut Ulumiyah (2023), seseorang yang hanya tunduk kepada Allah tidak dapat dieksploitasi oleh siapa pun. Kemerdekaan di sini dipahami sebagai kebebasan dari dominasi manusia atas manusia, bukan otonomi individu dalam pengertian liberal (interpretasi penulis).

Gagasan kesetaraan itu tampak dalam sikap dan tuntutan politiknya. Daulay (1997) mencatat bahwa ia menolak sikap tunduk berlebihan dan mendukung organisasi yang bertujuan membongkar simbol dan mentalitas feodal Jawa, di samping menuntut penghapusan kerja paksa dan perluasan pendidikan. Taufiqurrahman (2023) merangkum pengaruh pemikirannya terhadap Agus Salim dalam tiga prinsip: kemerdekaan umat yang menolak diskriminasi Belanda terhadap pribumi, kesetaraan yang menuntut martabat sama bagi pribumi, serta cinta tanah air dan anti-kapitalisme. Dalam aspek ekonomi, Ferdhiyadi dkk. (2023) menyebut zakat sebagai dasar distribusi kekayaan menurut Tjokroaminoto, sedangkan Manan (2016) mencatat bahwa zakat dan sedekah dipandangnya mengandung nilai

pemerataan kekayaan dan penghapusan anggapan bahwa kemiskinan itu hina. Prayitno dkk. (2022) menambahkan penekanannya pada kesederhanaan dan pandangan bahwa harta adalah milik Allah.

Relasi Agama, Nasionalisme, dan Negara

Hubungan agama dan negara dalam pemikiran Tjokroaminoto bertumpu pada gagasan bahwa Islam adalah ideologi yang aktif dan harus diperjuangkan, bukan sekadar ritual (Wibisono, 2020). Af'ali (2017) menyimpulkan bahwa nasionalisme menurutnya adalah persatuan rakyat melawan penjajah yang menindas, dan bahwa pemikirannya dipengaruhi latar keluarga religius serta gagasan Jamaluddin al-Afghani tentang persatuan umat Islam sedunia. Matien (2024) menyebut ia memadukan nasionalisme, Islam, dan sosialisme sebagai landasan moral dan ideologis melawan kolonialisme. Amin (1992) menegaskan bahwa visinya bernafaskan Islam yang sosialistik, berbeda dari kelompok Islam modernis yang menempuh jalan pragmatis dan kelompok Islam tradisionalis pada zamannya.

Konsekuensi politik dari sikap ini tampak dalam hubungannya dengan nasionalisme sekuler. Menurut Wibisono (2020), dalam PPPKI ia menentang organisasi yang tidak berlandaskan agama, terutama PNI, dan ketegangan itu membuat PSI keluar dari PPPKI pada 1930. Ulumiyah (2023) mencatat bahwa nasionalisme sekuler dipandang Tjokroaminoto sebagai nasionalisme sempit yang berbahaya. Prayitno dkk. (2022) menunjukkan bahwa Soekarno justru menafsirkan sosialisme Islam gurunya sebagai landasan nasionalisme, yang kemudian melahirkan gagasan Nasakom pada 1926. Dengan kata lain, rumusan yang sama dibaca secara berbeda oleh para muridnya.

Mengenai khilafah, Wibisono (2020) mencatat bahwa Tjokroaminoto aktif dalam Kongres Al-Islam dan isu kekhalifahan sehingga dicurigai berpaham Wahabi, dan hal itu memperkuat kecenderungan pan-Islamisme dalam pemikirannya. Keterlibatan ini tampak dalam konteks peristiwa 1924 di Turki dan Kongres Mekah 1926 (Ulumiyah, 2023). Namun, sumber-sumber yang ditelaah tidak memuat rumusan sistematis tentang khilafah sebagai bentuk negara yang hendak diterapkan di Indonesia. Keterlibatannya lebih tampak sebagai solidaritas dan konsolidasi umat, sementara tujuan politik langsungnya adalah pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) bagi Hindia Belanda (Ulumiyah, 2023). Wibisono (2020) pun menekankan bahwa bagi Tjokroaminoto Islam lebih berfungsi sebagai dasar mobilisasi politik dan ideologi perjuangan daripada kajian keagamaan yang mendalam.

Kepemimpinan Karismatik dalam Gerakan

Pemikiran politik Tjokroaminoto tidak dapat dilepaskan dari cara ia memimpin gerakan. Rizkianto (2020) menelaah kepemimpinannya dengan teori kepemimpinan karismatik dan menyimpulkan dua karakteristik, yaitu tidak bergantung pada otoritas dan membawa perubahan. Sumber karismanya terbagi dua: pemberian (*given*) berupa keturunan, kelahiran, dan fisik, serta hasil konstruksi pribadi berupa kecakapan manajerial, orasi, tulis-menulis, dan penguasaan berbagai ilmu. Dalam penerapannya, ia lebih mengoptimalkan kompetensi hasil konstruksi itu untuk membujuk dan mendidik pengikut, mengungkapkan cita-cita, menumbuhkan harapan, memotivasi, dan memberi teladan, yang menurut Rizkianto (2020) membantu menyelamatkan SI dari situasi krisis. Sisi pemberian tampak pada latar keturunan priayi dan kiai serta anggapan sebagian pengikut bahwa ia adalah ratu adil (Manan, 2016; Rizkianto, 2020). Ainol dan Ibrahim (2020) mencatat bahwa pemerintah kolonial menjulukinya raja Jawa yang tak dinobatkan, sementara rakyat menganggapnya wujud ratu adil.

Syukur dkk. (2020) menambahkan sisi organisasi. Menurut mereka, di bawah Tjokroaminoto SI bergeser dari pola gerakan tertutup yang bertumpu pada karisma pemimpin dan mitos ratu adil menuju kesadaran ideologis yang lebih rasional dan organisasi yang lebih terbuka, dengan pusat gerakan berpindah dari desa ke kota. Asas yang dipegang gerakannya mereka ringkas sebagai kebersihan tauhid, ilmu, dan siasat (politik), yang dikaitkan dengan kebangsaan dan penyatuan negeri-negeri berpenduduk Muslim (pan-Islamisme). Mereka juga mencatat bahwa gerakan SI semakin berani dan radikal sehingga pada Kongres Batavia 1917 menyuarakan tuntutan kemerdekaan kepada pemerintah Belanda (Syukur dkk., 2020).

Strategi Politik dan Kaderisasi

Dalam strategi politik, Tjokroaminoto menggunakan pengalaman hijrah Nabi sebagai rujukan. Menurut Ulumiyah (2023), keluarnya SI dari Volksraad dan peralihan ke sikap nonkooperasi dibaca sebagai migrasi seperti perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah, dan kongres Pekalongan 1927 menghasilkan kebijakan disiplin partai yang membatasi anggota SI merangkap keanggotaan organisasi lain. Kebijakan ini berujung pada perpisahan Muhammadiyah dari SI. Di sisi lain, sebagai guru politik ia memberi kebebasan berpikir kepada kadernya dan tidak memaksakan satu tafsir atas pemikirannya,

sehingga murid-muridnya menempuh jalan berbeda (Ulumiyah, 2023). Taufiqurrahman (2023) menunjukkan bahwa filosofi kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya diwariskan melalui Agus Salim kepada kader generasi berikutnya.

Perkembangan Pemikiran

Pemikiran politik tersebut tidak statis. Ulumiyah (2023) membaginya ke dalam tiga fase: sosialisme Islam (1924) sebagai respons terhadap kritik SI Merah, pencarian model peradaban ideal (1927) yang melahirkan *Tarikh Agama Islam*, dan fase puncak (1928) berupa *Memeriksai Alam Kebenaran* yang bercorak sufistik. Wibisono (2020) memakai pembagian lain, yaitu "Tjokro Muda" yang memakai Islam sebagai legitimasi dan simbol persatuan, dan "Tjokro Tua" setelah 1922 yang menjadikan Islam identitas pembeda nasionalisme. Dua pembagian ini berbeda dalam titik tekan, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa menilai Tjokroaminoto hanya dari satu teks atau satu periode berisiko menyederhanakan pemikirannya.

RELEVANSI DAN KRITIK KRITIS

Relevansi bagi Konteks Kontemporer

Pertama, dalam hal keadilan sosial-ekonomi, gagasan Tjokroaminoto tentang negara sebagai alat kesejahteraan dan penolakan terhadap monopoli, riba, dan eksploitasi dinilai relevan dengan konsep ke-Indonesiaan (Cahyani & Hasan, 2024). Ulumiyah (2023) merangkum kajian Badarussyamsi dkk. (2023) yang mengajukan sosialisme Islam Tjokroaminoto sebagai tanggapan atas kesenjangan sosial, kemiskinan, dan degradasi moral yang berujung pada korupsi, dengan tiga prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan serta kesesuaian dengan Pancasila. Rujukan ini bersifat tidak langsung karena kajian tersebut tidak diakses penulis secara langsung.

Kedua, dalam hal etika demokrasi, penekanan pada musyawarah, persatuan, dan kesejahteraan rakyat dipandang sebagai nilai reflektif bagi politik Islam keindonesiaan sekarang (Firdian, 2020). Wijiyanto (2025) menyarankan agar pembelajaran demokrasi dan kesetaraan di sekolah diperkuat dengan merujuk pemikiran Tjokroaminoto. Ketiga, dalam hal pendidikan karakter, gagasan *Moeslim Nationale Onderwijs* yang menekankan keberanian, keikhlasan, dan budi pekerti serta memadukan ilmu umum dan agama dipandang relevan bagi pengembangan kurikulum berbasis karakter (Hakim & Wirano, 2020; Wijiyanto, 2025). Wijiyanto (2025) juga mencatat bahwa konsep tersebut lebih berfungsi sebagai gagasan dan alat pergerakan daripada sistem operasional yang rinci. Ainol dan Ibrahim (2020) merinci tiga unsur gagasan pendidikan sosialis itu, yaitu sekolah swadaya masyarakat bagi semua golongan, integrasi ilmu umum dan ilmu agama, serta penanaman rasa kebangsaan, dan menilainya relevan untuk mengkritik gejala sekolah unggulan yang dalam praktiknya hanya dapat dimasuki anak dari keluarga mampu.

Keempat, dari sisi pemikiran keagamaan, Ferdhiyadi dkk. (2023) membandingkan sosialisme Islam Tjokroaminoto dengan teologi pembebasan Islam dan menyimpulkan bahwa keduanya memandang agama sebagai kekuatan pembebas yang berpihak pada kaum tertindas, serta bahwa Tjokroaminoto merumuskan gagasan serupa jauh sebelum istilah itu populer. Kelima, dari sisi kaderisasi, kebebasan berpikir yang ia berikan melahirkan ragam tokoh, dari Soekarno, Semaoen, dan Kartosuwiryo (Ulumiyah, 2023) hingga Agus Salim (Taufiqurrahman, 2023). Rizkianto (2020) merekomendasikan agar organisasi membangun kompetensi dan kepribadian kader sebagai sumber karisma, karena tidak semua orang memiliki karisma bawaan. Wibisono (2020) menyebut pengaruhnya mencakup kalangan modernis Masyumi seperti Natsir, dan menilainya sebagai mitra dialog bagi zamannya dan zaman sesudahnya. Ini menunjukkan bahwa pemikirannya lebih berfungsi sebagai sumber perdebatan yang produktif daripada doktrin tunggal.

Kritik Kritis

Orisinalitas dan asal-usul teks. Kritik paling mendasar datang dari Fogg (2019), yang berargumen bahwa Tjokroaminoto mengambil sosialisme Islamnya langsung dari tulisan berbahasa Inggris Mushir Hosein Kidwai, kemungkinan melalui perantara komunitas Ahmadiyah. Menurut Fogg, *Islam dan Sosialisme* mengikuti karya Kidwai (*Islam and Socialism*, London, 1912) secara dekat, baik dalam struktur maupun dalam bagian-bagian yang diubah, sehingga lebih tepat dipandang sebagai terjemahan-adaptasi daripada karya orisinal. Junaidi dkk. (2023) melaporkan bahwa Syed Hussein Alatas juga mencatat pengaruh Kidwai tersebut. Menurut rangkuman mereka atas temuan Fogg, hanya bab terakhir yang sebagian besar berisi materi orisinal Tjokroaminoto karena membahas organisasinya

sendiri, tetapi Fogg juga menekankan bahwa penyaduran tulisan asing merupakan praktik yang lazim di kalangan penulis Indonesia masa itu. Junaidi dkk. (2023) menambahkan bahwa buku Tjokroaminoto dicetak ulang tujuh kali pada 1946-2010, sedangkan teks Kidwai tidak dicetak ulang. Hal ini memengaruhi cara menilai relevansinya. Klaim bahwa sosialisme Islam adalah rumusan asli pemikir Nusantara perlu dikoreksi. Meski demikian, penulis berpendapat bahwa temuan ini tidak serta-merta menggugurkan nilai gagasan tersebut. Adaptasi atas teks asing untuk menjawab situasi kolonial Hindia Belanda tetap merupakan tindakan intelektual dan politik yang bermakna, dan temuan Fogg justru memperlihatkan bahwa gagasan Islam politik Indonesia bersirkulasi dalam jejaring global, termasuk arus Asia Selatan yang selama ini kurang diperhatikan. Penilaian ini merupakan interpretasi penulis atas ringkasan temuan Fogg yang dapat diakses.

Kedalaman dan karakter dasar keagamaan. Para peneliti tidak sepakat mengenai bobot keagamaan pemikirannya. Wibisono (2020) menilai argumen keagamaan Tjokroaminoto pada fase awal dangkal, bercampur unsur budaya Jawa, dan terutama dipakai untuk legitimasi dan propaganda politik. Wiyono (2017) menyimpulkan bahwa *Islam dan Sosialisme* tidak memenuhi metode tafsir yang dikenal, sering mengutip potongan ayat tanpa nomor surat dan ayat, dan tidak menemukan bukti kuat bahwa penulisnya menguasai ilmu bahasa Arab dan perangkat ulumul Qur'an, meskipun tetap menghargai kualitas buku itu sebagai gagasan ekonomi sosialis berperspektif Islam. Sebaliknya, Ulumiyah (2023) menunjukkan sisi lain melalui *Memeriksai Alam Kebenaran* (1928) yang bercorak sufistik dan menempatkannya sebagai karya puncak pemikiran Tjokroaminoto. Bagi penulis, perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian atas kedalaman keagamaannya bergantung pada fase dan naskah yang dipilih. Kritik Wiyono tepat jika *Islam dan Sosialisme* diukur sebagai karya tafsir, tetapi karya itu sejak awal merupakan tulisan politik-propaganda, sehingga ukuran tafsir kurang adil bagi tujuannya.

Ketegangan antara hukum ilahi dan kedaulatan rakyat. Seperti dicatat Manan (2016), Tjokroaminoto menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan sehingga tidak dibuat oleh parlemen, tetapi pada saat yang sama berpendapat bahwa rakyat harus memiliki suara langsung dalam urusan negara, tanpa menjelaskan mekanismenya. Ketegangan ini menjadi persoalan serius bila gagasan tersebut dibawa ke negara hukum yang plural dan konstitusional, tempat produk hukum dihasilkan melalui lembaga perwakilan dan harus berlaku bagi warga dari beragam keyakinan. Sumber-sumber memang menunjukkan adanya unsur penyeimbang, yaitu persamaan yang mencakup non-Muslim (Alfarizi & Fuad, 2025) dan Piagam Madinah sebagai konstitusi bagi warga Muslim dan non-Muslim (Ulumiyah, 2023). Namun sumber-sumber itu tidak menguraikan bagaimana hukum ilahi dan hukum buatan lembaga perwakilan dipertemukan dalam praktik. Dari sudut ini, pemikirannya lebih tepat diperlakukan sebagai sumber nilai etis daripada cetak biru kelembagaan (interpretasi penulis).

Klaim historis yang belum teruji dan basis sumber yang sempit. Manan (2016) mencatat bahwa klaim bahwa sosialisme telah ada sejak masa Nabi bertumpu terutama pada tafsir Tjokroaminoto sendiri dan belum diuji dengan sumber sejarah lain, dan bahwa kajiannya bersandar pada satu teks edisi 2010. Catatan itu berlaku pula bagi sebagian besar kajian yang penulis telaah, yang kerap mengulang rumusan tiga prinsip yang sama dari sumber yang sama. Beberapa sumber sekunder juga memiliki ketidakkonsistenan internal, misalnya perbedaan tanggal pendirian SI dalam satu artikel (Alfarizi & Fuad, 2025; Syukur dkk., 2020) dan rujukan yang tidak sepadan dengan daftar pustaka (Hakim & Wirano, 2020; Taufiqurrahman, 2023). Karena itu, pembaca perlu berhati-hati memperlakukan rincian faktual dari literatur sekunder tanpa verifikasi dengan sumber primer.

Persatuan yang tidak tercapai dan risiko polarisasi. Tujuan *zelfbestuur* menurut Tjokroaminoto hanya dapat dicapai bila masyarakat bersatu, tetapi pada 1925-1927 masyarakat justru terfragmentasi, dengan banyak organisasi lahir dan memisahkan diri dari SI (Ulumiyah, 2023). SI sendiri mengalami perpecahan dengan SI Merah, perpisahan dengan Muhammadiyah, dan pada 1930 PSI keluar dari PPPKI akibat ketegangan dengan PNI (Ulumiyah, 2023; Wibisono, 2020). Pengalaman ini menunjukkan bahwa menjadikan Islam sebagai identitas pembeda nasionalisme memberi daya mobilisasi yang besar tetapi juga memperdalam garis pemisah dengan kelompok yang berbeda dasar. Bagi Indonesia kontemporer, hal ini mengingatkan risiko penggunaan identitas agama sebagai alat mobilisasi politik tanpa kesepakatan nilai bersama yang inklusif (interpretasi penulis). Ulumiyah (2023) mencatat bahwa kebebasan berpikir yang diberikan kepada kader memang melahirkan ragam tokoh, tetapi tidak menjamin ragam itu bergerak dalam satu barisan.

Ketergantungan pada figur karismatik. Kepemimpinan Tjokroaminoto bertumpu kuat pada karisma pribadi. Rizkianto (2020) mencatat laporan Korver bahwa di cabang-cabang SI di desa Jawa

pengikut kadang memperlakukannya secara berlebihan, seperti mencium tangan dan kakinya, dan bahwa sebagian menyebutnya Juru Selamat atau Heru-Tjokro, simbol ratu adil dalam kepercayaan Jawa. Subekti, sebagaimana dikutip Rizkianto (2020), tidak menyimpulkan bahwa karisma adalah satu-satunya bentuk kepemimpinannya dan menyebutnya dapat pula disebut paternalistik. Bagi penulis, kenyataan ini menimbulkan ketegangan dengan gagasan "sama rata sama rasa" yang ia perjuangkan (Ainol & Ibrahim, 2020), sebab penghormatan berlebihan kepada pemimpin berpotensi mengaburkan kesetaraan dan membuat organisasi bergantung pada satu orang (interpretasi penulis). Syukur dkk. (2020) memang menilai SI bergerak menuju organisasi yang lebih terbuka, tetapi sumber-sumber yang ditelaah tidak menunjukkan seberapa jauh pelembagaan itu menggantikan ketergantungan pada sang pemimpin.

Corak literatur yang apresiatif. Terakhir, kajian tentang Tjokroaminoto cenderung memuliakan tokohnya. Manan (2016) mencatat bahwa penghormatan besar terhadap Tjokroaminoto, termasuk anggapan sebagian masyarakat yang menyebutnya ratu adil, dapat ikut membentuk penilaian terhadap pemikirannya, dan Daulay (1997) hanya menawarkan penilaian yang sangat positif. Karena itu, relevansi yang diuraikan pada bagian sebelumnya perlu dibaca bersama kritik di atas, dan keduanya diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Gagasan, Relevansi, dan Kritik

Konsep	Gagasan inti (menurut sumber)	Relevansi kontemporer	Kritik utama
Negara	Alat kesejahteraan bersama; peran aktif dalam ekonomi; hukum ilahi dan musyawarah (Suhardi, 2004; Manan, 2016; Alfarizi & Fuad, 2025)	Dasar etika kebijakan ekonomi yang menolak monopoli dan eksploitasi	Bentuk kelembagaan tidak dirinci; kaitannya dengan negara plural belum jelas
Demokrasi	Musyawarah sebagai inti; kritik demokrasi perwakilan (Wiyono, 2017; Manan, 2016)	Rujukan etika deliberasi dan partisipasi	Tegangan hukum ilahi dan kedaulatan rakyat; mekanisme tidak diuraikan
Kesetaraan	Kemerdekaan, persamaan, persaudaraan; "sama rata sama rasa"; zakat dan anti-riba (Ulumiyah, 2023; Ainol & Ibrahim, 2020; Junaidi dkk., 2023)	Landasan keadilan sosial dan antidiskriminasi	Bukan konsep hak asasi modern; dasar historis bertumpu pada tafsirnya sendiri
Agama dan nasionalisme	Islam sebagai dasar nasionalisme; solidaritas umat (Wibisono, 2020; Af'ali, 2017)	Pelajaran tentang hubungan agama dan kebangsaan	Instrumentalisasi identitas; ketegangan dengan nasionalis sekuler
Kepemimpinan	Karisma bersumber dari keturunan dan kompetensi; kebebasan berpikir bagi kader (Rizkianto, 2020; Ulumiyah, 2023)	Kaderisasi berbasis kompetensi dan kepribadian	Ketergantungan pada figur dan citra ratu adil; risiko perpecahan
Asal-usul gagasan	Naskah 1924 dekat dengan karya Kidwai tahun 1912 (Fogg, 2019; Junaidi dkk., 2023)	Memperlihatkan sirkulasi gagasan global dan kemampuan adaptasi	Klaim orisinalitas perlu dikoreksi

Sumber: Diolah penulis dari Af'ali (2017), Ainol dan Ibrahim (2020), Alfarizi dan Fuad (2025), Fogg (2019), Junaidi dkk. (2023), Manan (2016), Rizkianto (2020), Suhardi (2004), Ulumiyah (2023),

Wibisono (2020), dan Wiyono (2017). Kolom relevansi kontemporer dan kritik utama merupakan interpretasi penulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah terhadap 23 sumber sekunder, artikel ini menyimpulkan lima hal. Pertama, pemikiran politik Tjokroaminoto terbentuk dalam situasi kolonial yang eksploitatif dan persaingan ideologi di dalam SI, dengan titik balik sekitar 1922 yang membuat Islam menjadi dasar ideologi dan identitas pembeda nasionalisme. Kedua, intinya adalah sosialisme Islam yang bertumpu pada kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan; negara dipandang sebagai alat kesejahteraan bersama yang berperan aktif dalam ekonomi dan menolak monopoli, riba, serta eksploitasi. Ketiga, demokrasi dipahami melalui musyawarah dan partisipasi rakyat dengan kritik terhadap demokrasi perwakilan, sementara hubungan agama dan negara diwujudkan dalam gagasan Islam sebagai dasar nasionalisme dan solidaritas umat, bukan dalam rumusan sistematis tentang khilafah. Keempat, pemikirannya berkembang dalam beberapa fase sehingga tidak dapat direduksi pada satu naskah, dan kepemimpinannya bertumpu pada karisma yang sebagian besar dibangun melalui kompetensi.

Kelima, secara kritis pemikiran tersebut memiliki kekuatan sebagai sumber etika keadilan sosial, musyawarah, dan pendidikan karakter, tetapi juga memiliki keterbatasan: kedekatan naskah utamanya dengan karya Kidwai, perdebatan tentang kedalaman dasar keagamaannya, ketegangan antara hukum ilahi dan kedaulatan rakyat yang belum dijelaskan mekanismenya, pengalaman perpecahan gerakan akibat identitas yang dipertajam, dan ketergantungan pada figur karismatik. Karena itu, relevansinya paling tepat dipahami sebagai sumber nilai dan pelajaran sejarah, bukan model kelembagaan siap pakai bagi negara Indonesia yang plural.

Berdasarkan simpulan tersebut, saran dan implikasi yang diajukan adalah sebagai berikut. Bagi peneliti, kajian lanjutan perlu menganalisis naskah primer Tjokroaminoto secara langsung dan membandingkannya dengan karya Kidwai untuk menentukan bagian yang disadur dan bagian yang disesuaikan, serta menguji klaim-klaim historisnya dengan sumber lain. Bagi dunia pendidikan, nilai kesetaraan, musyawarah, dan keberanian moral dalam pemikiran Tjokroaminoto dapat dijadikan bahan pendidikan kewargaan dan karakter, dengan tetap melatih peserta didik membaca tokoh secara kritis. Bagi praktik politik dan organisasi, pelajaran dari SI menunjukkan perlunya menyertai keterbukaan terhadap perbedaan dengan kesepakatan nilai bersama, menjaga agar identitas agama tidak menjadi alat yang memperlebar perpecahan, serta membangun kaderisasi berbasis kompetensi agar organisasi tidak bergantung pada satu figur (Rizkianto, 2020). Keterbatasan penelitian ini adalah ketergantungannya pada sumber sekunder, dan delapan di antaranya hanya diakses melalui abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

Af'ali, Z. (2017). *Studi pemikiran nasionalisme HOS. Tjokroaminoto* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27287/

Ainol, & Ibrahim, F. (2020). Relevansi konsep pendidikan sosialis perspektif H.O.S Tjokroaminoto dengan pendidikan agama Islam. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan, 6*(2), 136-150. https://doi.org/10.36835/attalim.v5i2.361

Alfarizi, A., & Fuad, A. N. (2025). Pemikiran sosialisme Islam menurut H.O.S Tjokroaminoto. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI), 2*, 474-481. https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/3911

Amin, M. M. (1992). Visi HOS Tjokroaminoto tentang masa depan Indonesia merdeka. *Al-Jami'ah*, (50). https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/282/

Cahyani, M. S., & Hasan, A. (2024). Relevansi pemikiran ekonomi sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto dalam konsep ke-Indonesiaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(3), 2847-2853. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14672

Daulay, A. S. (1997). Al-Ḥājj ʿUmar Saʿīd Shukrī Aminoto: Ḥayātuh wa kifāḥuh wa afkāruh. *Studia Islamika, 4*(4). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/768

Ferdhiyadi, Yunus, A. R., & Syukur, S. (2023). Pemikiran teologi pembebasan Islam H.O.S Cokrominoto. *Attoriolong: Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah, 21*(1), 66-77.

Firdian, F. (2020). *Pemikiran politik Islam H.O.S Tjokroaminoto dan relevansinya pada politik Islam Indonesia dewasa ini* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40660/

Fogg, K. W. (2019). Indonesian Islamic socialism and its South Asian roots. *Modern Asian Studies, 53*(6), 1736-1761. https://doi.org/10.1017/S0026749X17000646

Hakim, A. R., & Wirano. (2020). Konsep pendidikan Islam perspektif H.O.S Tjokroaminoto. *Urwatul Wutsqo, 9*(1), 140-159.

Ibnu, S. (2024). *Praktik ekonomi pertanian berbasis pemikiran Hos Tjokroaminoto* [Skripsi, IAIN Kediri]. https://etheses.iainkediri.ac.id/17747/

Junaidi, J., Abdul Majid, L., & Nazri, M. A. (2023). Social justice in Islam: The perspective of Tjokroaminoto & Syed Hussein Alatas. *TURATH: Journal of Al-Quran and Al-Sunnah, 8*(1), 10-20. https://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/index

Manan, F. (2016). Sosialisme Islam: Perspektif pemikiran politik H.O.S. Tjokroaminoto. *Jurnal Wacana Politik, 1*(1), 62-70.

Matien, S. A. (2024). *Pemikiran kebangsaan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto tahun 1916-1934* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/108384/

Prayitno, P. A., Fakhruddin, M., & Kurniawati. (2022). Peran HOS Tjokroaminoto dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjalanan Soekarno memahami Islam tahun 1915-1934. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 11*(1), 29-38.

Rizkianto, A. (2020). Kepemimpinan karismatik H.O.S. Tjokroaminoto di Sarekat Islam. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah, 2*(1), 55-80.

Suhardi. (2004). *Pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang relasi agama dan negara* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35898/

Syukur, A., Putra, R. A., Saifullah, & Rolanda, D. M. (2020). Haji Oemar Said Tjokroaminoto: Biografi, dakwah dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 5*(2), 177-190.

Taufiqurrahman. (2023). Islam and socialism in Indonesia: The influence of HOS Tjokroaminoto's thoughts on Agus Salim. *Islamic Thought Review, 1*(2), 169-178. https://doi.org/10.30983/itr.v1i2.7260

Ulumiyah, M. S. B. (2023). Dari sosialisme menuju Islam makrifat: Evolusi pemikiran HOS Tjokroaminoto, 1924-1928. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 7*(2), 242-278. https://doi.org/10.23971/njppi.v7i2.7163

Wibisono, Y. (2020). Pemikiran Haji Oemar Said Tjokroaminoto tentang nasionalisme Islam. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(1), 31-39.

Wijiyanto, S. T. (2025). Tjokroaminoto: Perpaduan pendidikan Barat dan nilai-nilai Islam. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 21*(1). https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria

Wiyono, M. (2017). Menakar Tjokroaminoto dalam deretan mufasir Nusantara. *Al-Tahrir, 17*(1), 133-154.